

**STRATEGI PENINGKATAN PERTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DENGAN PENDEKATAN
BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM DI DESA WISATA MUNGU, KABUPATEN
BADUNG, BALI**

Muhammad Indra Prayoga, I Made Adikampana, Saptono Nugroho

Program Studi Pariwisata Program Sarjana, Fakultas Pariwisata, Universitas Udayana,

Jl. Sri Ratu Mahendradatta, Jimbaran, Bali 80361 Indonesia

Muhamadindraprayoga@gmail.com adikampana@unud.ac.id

saptono_nugroho@unud.ac.id

Abstract

Munggu Tourism Village in Badung Regency, Bali, represents a paradox in rural tourism development: despite being recognized as a "developed" tourism village with the highest visitor volume in its region, the qualitative level of local community participation remains shallow and reactive. This study aims to analyze the root causes of this condition and formulate a strategic framework to transform the participation model from induced to authentic spontaneous participation. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. Data analysis was conducted using a conceptual framework integrating Tosun's (2006) participation typology, Community-Based Tourism (CBT) principles, and the Tri Hita Karana philosophy. The findings indicate that the dominant induced participation is not a reflection of the community's lack of will, but a logical response to a series of interconnected structural barriers: legal uncertainty over business land status, bureaucratic delays in disbursing development funds, and a fundamental mismatch between the village's unique cultural assets and the existing tourist market segment. As a solution, this study proposes a holistic framework focused on the four pillars of CBT: (1) strengthening engagement and ownership through customary-based land dispute resolution; (2) environmental preservation through community-based incentive programs; (3) cultural livelihood development through product diversification into experiential tourism; and (4) equitable economic benefit distribution through community investment schemes and transparent development funds. This framework offers a replicable model for fostering sustainable tourism genuinely rooted in community empowerment.

Keywords: Community-Based Tourism, Induced Participation, Spontaneous Participation, Structural Barriers, Munggu Tourism Village.

I. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kebijakan pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, telah mengalami pergeseran strategis menuju pengembangan desa wisata. Kebijakan ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan krusial: mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata, mengurangi tekanan pada destinasi massal yang jenuh seperti Kuta dan sekitarnya, serta mempromosikan pelestarian budaya sebagai aset inti pariwisata.¹ Pengembangan desa

wisata diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga nilai-nilai luhur adat setempat. Dalam konteks ini, Desa Wisata Munggu di Kabupaten Badung tampil sebagai contoh keberhasilan. Sebagai salah satu dari 17 desa wisata yang ditetapkan di kabupaten paling berpengaruh di Bali, Munggu secara konsisten mencatat jumlah kunjungan wisatawan tertinggi.¹ Pengakuan resmi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengkategorikannya sebagai desa wisata "maju" semakin memperkuat citra kesuksesannya.

Namun, di balik angka-angka kuantitatif yang mengesankan, tersembunyi sebuah paradoks yang menjadi inti dari penelitian ini: "Paradoks Munggu". Meskipun sukses secara statistik, kualitas partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata di desa ini masih dangkal, bersifat reaktif, dan sangat bergantung pada dorongan eksternal. Keterlibatan komunitas cenderung bersifat sementara, hanya muncul ketika ada program pelatihan atau bantuan dari pemerintah, dan surut ketika stimulus tersebut berakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model pariwisata yang berjalan belum sepenuhnya berkelanjutan dan berakar dari inisiatif komunitas itu sendiri.

Artikel ini berargumen bahwa kondisi Partisipasi terdorong ini bukanlah akibat dari kegagalan kemauan komunitas, melainkan merupakan respons rasional terhadap serangkaian hambatan struktural yang belum terselesaikan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi ketidakpastian status hukum lahan usaha, kelambanan birokrasi dalam penyaluran dana pembangunan, dan ketidaksesuaian fundamental antara aset budaya yang dimiliki desa dengan profil pasar wisatawan yang saat ini mendominasi.¹ Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mendiagnosis secara mendalam hambatan-hambatan tersebut dan merumuskan sebuah strategi komprehensif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Community-Based Tourism* (CBT) untuk mengkatalisasi pergeseran menuju partisipasi yang otentik dan spontan.

Lebih jauh, kasus Munggu menyoroti bahaya dari ketergantungan pada metrik kuantitatif dalam mengukur keberhasilan pembangunan pariwisata. Label "maju" yang didasarkan pada volume kunjungan yang tinggi berisiko menutupi kelemahan kualitatif yang mendasar dan dapat menciptakan kepuasan kebijakan yang keliru. Volume kunjungan yang tinggi, yang sebagian besar terdiri dari wisatawan domestik harian dengan daya belanja rendah, justru dapat menghambat pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang bernilai tinggi.¹ Pasar ini cenderung tidak menghargai pengalaman budaya yang mendalam, seperti lokakarya tradisi Mekotek atau seni rupa lokal. Akibatnya, komunitas tidak memiliki insentif ekonomi untuk mengembangkan produk-produk bernilai tambah tersebut dan lebih memilih untuk menyediakan layanan bervolume tinggi dengan keterampilan rendah, seperti warung makanan sederhana. Situasi ini menciptakan sebuah perangkap pembangunan, di mana metrik keberhasilan (jumlah pengunjung) justru melanggengkan stagnasi pengembangan pariwisata kualitatif yang digerakkan oleh komunitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pariwisata

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha terkait. Ini mencakup semua kegiatan wisata, pengusahaan objek dan daya tarik (kawasan wisata, taman rekreasi, peninggalan sejarah, museum, pagelaran seni budaya, keindahan alam), serta usaha jasa dan sarana pariwisata (biro perjalanan, akomodasi, rumah makan). Pariwisata didefinisikan sebagai pergerakan manusia yang kompleks, melibatkan organisasi, hubungan kelembagaan, dan kebutuhan layanan. Secara teknis, *World Tourism Organization* (WTO) mendefinisikan pariwisata sebagai kegiatan seseorang yang bepergian ke tempat di luar lingkungan biasanya selama tidak lebih dari satu tahun untuk kesenangan, bisnis, atau tujuan lain. Berdasarkan jenisnya, pariwisata dapat dibagi menjadi wisata alam (wisata pantai, etnik, cagar alam, buru, agro) dan wisata sosial-budaya (monumen, museum, dan fasilitas budaya lainnya).

2.2 Konsep Desa Wisata

Desa wisata adalah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata khas, yang menawarkan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat perdesaan. Menurut Nuryanti (1993), desa wisata merupakan integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Dalam pengembangannya, masyarakat dijadikan subjek aktif, di mana lingkungan dan kehidupan sosial mereka menjadi tujuan wisata. Tujuan utamanya tidak hanya menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga menyejahterakan masyarakat desa dengan membuka lapangan pekerjaan.

2.3 Konsep Desa Adat

Berdasarkan Perda Bali Nomor 4 Tahun 2019, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, serta tradisi dan tata krama yang diatur secara turun-temurun dalam kaitan dengan tempat suci (*khayangan tiga*). Desa Adat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui aturan berupa *awig-awig* (hukum adat) yang berlandaskan filosofi *Tri Hita Karana*. Desa Adat terdiri dari tiga unsur utama: *Parahyangan* yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, *Pawongan* yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia dan *Palemahan* yaitu hubungan manusia dengan alam.

2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah hak masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan. Tosun (2006) mengklasifikasikan partisipasi masyarakat ke dalam tiga tipe :

- 1) Partisipasi Paksaan (*Coercive Participation*): Keterlibatan yang didasari oleh paksaan atau tekanan, tanpa kehendak bebas dari individu atau kelompok.

- 2) Partisipasi Ter dorong (*Induced Participation*): Keterlibatan yang dipicu oleh dorongan atau insentif eksternal, seperti imbalan, pengakuan, atau tekanan dari luar, bukan sepenuhnya dari kemauan intrinsik.
- 3) Partisipasi Spontan (*Spontaneous Participation*): Keterlibatan yang bersifat sukarela, berasal dari inisiatif sendiri tanpa adanya dorongan atau tekanan eksternal.

Faktor pendorong partisipasi meliputi kesempatan, kemauan, kemampuan, dan pendanaan. Sementara itu, faktor penghambatnya terdiri dari keterbatasan operasional (misalnya, sentralisasi administrasi, kurangnya koordinasi), keterbatasan struktural (misalnya, dominasi elit, kurangnya peraturan), dan keterbatasan kebudayaan (misalnya, sikap apatis, kesadaran rendah).

2.5 Konsep Tri Hita Karana

Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang menekankan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama manusia (*Pawongan*), dan manusia dengan alam lingkungan (*Palemahan*). Konsep ini menjadi pilar utama dalam menjaga keseimbangan kehidupan dan dapat diterapkan dalam pembangunan pariwisata. *Parahyangan* diwujudkan melalui aktivitas spiritual dan menjaga kesucian tempat-tempat suci. *Pawongan* menekankan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, partisipasi aktif, dan pemerataan manfaat. *Palemahan* menegaskan bahwa pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dengan prinsip keberlanjutan.

2.6 Teori Community Based Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) adalah pendekatan pembangunan pariwisata yang menekankan pada peran serta komunitas lokal. Konsep ini mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi mereka, sambil menjaga kualitas lingkungan serta melindungi kehidupan sosial dan budayanya. Suansri (2003) mengemukakan sepuluh prinsip utama CBT, yang dapat disederhanakan menjadi empat pilar pengelolaan :

1. Keikutsertaan anggota komunitas ke dalam setiap kegiatan pariwisata: Mengakui dan mengembangkan kepemilikan komunitas, melibatkan mereka dalam setiap aspek pengambilan keputusan, serta mengembangkan kebanggaan dan kualitas hidup komunitas.
2. Menjaga lingkungan hidup: Menjamin keberlanjutan lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan meminimalkan dampak negatif pariwisata.
3. Kelestarian budaya: Mempertahankan keunikan karakter dan budaya lokal, mendorong pertukaran budaya, serta menghargai perbedaan dan martabat manusia.
4. Pemerataan pendapatan: Mendistribusikan keuntungan dari pariwisata secara adil kepada seluruh anggota komunitas dan melibatkan mereka dalam menentukan alokasi pendapatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai dinamika sosio-ekonomi dan partisipasi masyarakat di Desa Wisata Munggu. Data penelitian dikumpulkan melalui triangulasi tiga metode utama untuk memastikan validitas dan kekayaan informasi :

1. Wawancara Mendalam: Dilakukan dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan dan peran mereka dalam pariwisata desa. Informan mencakup Perbekel Desa, pengurus Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku usaha pariwisata lokal (seniman, pedagang), serta perwakilan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.¹
2. Observasi : Pengamatan langsung dilakukan di lokasi-lokasi kunci seperti kawasan Pantai Munggu, sanggar seni, dan area komersial lainnya. Observasi ini berfokus pada interaksi antara wisatawan dan komunitas, kondisi fasilitas pariwisata, serta aktivitas sehari-hari yang relevan dengan penelitian.¹
3. Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan mencakup analisis terhadap data statistik kunjungan wisatawan, peraturan desa, rencana strategis pengembangan desa wisata, dan laporan- laporan terkait yang relevan.¹

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Proses ini melibatkan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data mentah dari transkrip wawancara dan catatan lapangan direduksi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema yang muncul. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan matriks untuk mempermudah pemahaman. Analisis tematik diterapkan untuk mengelompokkan temuan sesuai dengan kerangka konseptual yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Eksisting Desa Wisata Munggu

Desa Wisata Munggu, yang secara resmi dikategorikan sebagai desa wisata "maju" oleh Kemenparekraf, memiliki tatanan sosial-budaya yang kuat berlandaskan sistem banjar adat dan filosofi Tri Hita Karana. Potensi pariwisatanya mencakup atraksi alam seperti Pantai Munggu dan persawahan hijau, serta kekayaan budaya seperti tradisi Mekotek yang unik. Dari segi komponen pariwisata 4A, desa ini memiliki atraksi yang kuat, aksesibilitas yang memadai, dan amenitas yang cukup baik seperti homestay dan kafe. Dari sisi komponen pariwisata 4A, Desa Munggu memiliki potensi yang signifikan :

1. Attraction (Atraksi): Daya tarik utama meliputi keindahan alam seperti Pantai Munggu yang berpasir hitam dan hamparan persawahan hijau. Dari sisi budaya,

tradisi Mekotek menjadi ikon unik, didukung oleh kekayaan seni seperti lukisan, gamelan, dan pertunjukan *Ngelawang*. Potensi lain seperti Sungai Penet sedang dalam tahap pengembangan untuk jalur *tracking*.

2. Accessibility (Aksesibilitas): Aksesibilitas menuju desa tergolong baik dengan jalan beraspal yang memadai. Informasi mengenai desa juga mudah ditemukan melalui situs resmi dan aplikasi peta digital seperti Google Maps, serta didukung oleh agen perjalanan lokal.
3. Amenities (Amenitas): Fasilitas pendukung cukup lengkap, mencakup beragam akomodasi (homestay, villa), tempat makan (afe, restoran), minimarket, hingga fasilitas kesehatan dan kebugaran seperti tempat yoga dan pilates.
4. Ancillary (Layanan Pelengkap): Keamanan didukung oleh pos jaga, namun pusat informasi yang terstruktur masih kurang. Potensi untuk kegiatan seperti paralayang atau festival layang-layang belum dikembangkan secara optimal, menunjukkan perlunya peningkatan dalam program wisata yang terjadwal dan pelatihan *hospitality* bagi petugas.

Namun, dinamika pariwisata di Munggu menunjukkan sebuah paradoks. Mayoritas pengunjung adalah wisatawan domestik harian yang fokus pada rekreasi pasif di pantai, dengan interaksi yang sangat terbatas dengan komunitas lokal. Pola kunjungan ini mengakibatkan rendahnya transaksi ekonomi untuk produk-produk wisata budaya, seperti paket wisata, lokakarya, atau jasa pemandu. Akibatnya, muncul persepsi di kalangan masyarakat bahwa pariwisata belum memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi secara aktif. Wisatawan mancanegara yang datang pun cenderung menetap jangka panjang di vila tanpa banyak terlibat dalam aktivitas desa, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat luas.

Ketidaksesuaian antara profil pasar yang ada dengan aset budaya yang dimiliki desa ini menjadi akar masalah yang menghambat partisipasi spontan. Masyarakat menjadi kurang terdorong untuk menciptakan atau mengembangkan atraksi wisata berbasis budaya karena merasa tidak ada permintaan yang jelas dari pasar yang ada saat ini. Situasi ini memperkuat kecenderungan partisipasi yang bersifat reaktif atau hanya muncul ketika ada program dari luar, yang menjadi landasan bagi pembahasan tipe partisipasi dominan di desa ini.

4.2 Tipologi Partisipasi Masyarakat Lokal

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa mode partisipasi yang paling dominan di Desa Munggu adalah partisipasi Terdorong. Keterlibatan masyarakat secara umum bersifat pasif dan reaktif, di mana aktivitas pariwisata memuncak hanya sebagai respons terhadap program-program yang diinisiasi oleh pihak eksternal, seperti pelatihan

dari dinas pariwisata atau instruksi langsung dari pemerintah desa. Inisiatif yang lahir dari akar rumput masih sangat minim, menandakan bahwa rasa kepemilikan terhadap pengembangan pariwisata belum tertanam secara mendalam. Kondisi ini disebabkan oleh serangkaian hambatan yang saling terkait dan menciptakan sebuah sistem yang melumpuhkan inisiatif lokal:

1. Masalah status lahan : Hambatan paling fundamental adalah status sewa lahan di kawasan strategis Pantai Munggu yang hanya berlaku tahunan. Lahan tersebut merupakan milik Pura Dalem, dan sistem kontrak jangka pendek ini menciptakan risiko investasi yang tinggi bagi masyarakat lokal. Akibatnya, mereka enggan membangun fasilitas usaha yang berkualitas dan permanen, yang pada gilirannya menghasilkan lingkungan komersial yang terkesan kumuh dan tidak menarik.
2. Hambatan birokrasi pendanaan: Proses pengajuan dan pencairan dana pembangunan dari pemerintah kabupaten terbukti lambat dan rumit. Kesenjangan waktu yang panjang antara tahap perencanaan partisipatif (di mana masyarakat telah menyumbangkan ide dan aspirasi) dengan eksekusi di lapangan menyebabkan frustrasi dan memperkuat persepsi bahwa kontribusi mereka tidak berdampak nyata.
3. Segmentasi pasar yang tidak seusuai: Terdapat ketidaksinambungan antara aset budaya yang dimiliki Desa Wisata Munggu seperti tradisi *Mekotek* yang unik dan seni pertunjukan yang hidup dengan segmen pasar dominan yaitu wisatawan domestik harian. Wisatawan jenis ini cenderung mencari rekreasi pantai yang pasif dan memiliki minat serta daya beli yang rendah untuk pengalaman budaya otentik. Ketidaksesuaian ini secara efektif mendekvaluasi modal budaya desa dan menghilangkan insentif ekonomi bagi lahirnya kewirausahaan budaya yang spontan.
4. Kesenjangan kelembagaan Pokdarwis : Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga yang semestinya menjadi motor penggerak partisipasi dari bawah, belum berfungsi secara optimal. Perannya lebih sebagai penerima pasif program *top-down* ketimbang sebagai fasilitator dinamis yang mampu membangkitkan dan mengelola inisiatif dari dalam komunitas, sebuah kelemahan yang juga telah teridentifikasi dalam penelitian sebelumnya.

Keempat hambatan ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah siklus yang saling memperkuat dan melanggengkan kepasifan. Seorang calon wirausahawan lokal yang ingin memulai usaha dihadapkan pada risiko tinggi akibat ketidakpastian status lahan. Risiko ini menghalanginya untuk berinvestasi pada fasilitas yang berkualitas. Ia juga mengamati bahwa pasar yang ada saat ini tidak menghargai penawaran premium. Jika ia mencari dukungan dari desa, ia akan menemukan bahwa realisasi bantuan terhambat oleh birokrasi pendanaan yang lambat, dan Pokdarwis pun tidak memiliki program pengembangan usaha yang proaktif. Dihadapkan pada risiko tinggi, permintaan pasar yang rendah, dan dukungan kelembagaan yang lemah, keputusan paling rasional adalah tidak

melakukan apa-apa atau menunggu program bantuan dari pemerintah. Sistem ini secara logis menghasilkan Partisipasi Terdorong sebagai output alaminya, yang menjelaskan mengapa partisipasi spontan sangat jarang terjadi.

4.3 Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Lokal Desa Wisata Munggu dengan Prinsip-prinsip CBT Untuk memutus siklus kepasifan dan mendorong transisi menuju partisipasi spontan, penelitian

ini merumuskan sebuah kerangka kerja strategis yang holistik. Setiap intervensi dirancang untuk secara langsung mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi, dengan berlandaskan pada empat prinsip utama CBT.

Tabel 1: Kerangka Strategis untuk Transisi dari Partisipasi Terdorong menuju Partisipasi Spontan di Desa Munggu

Prinsip CBT	Hambatan yang Diidentifikasi	Intervensi Strategis yang Diusulkan	Hasil yang Diharapkan (Pergeseran ke Partisipasi Spontan)
I. Keterlibatan & Kepemilikan	Status lahan tidak pasti menghambat investasi; Pokdarwis lemah.	Mediasi perjanjian sewa jangka panjang melalui <i>paruman adat</i> ; Revitalisasi Pokdarwis dengan membentuk divisi pemuda.	Investasi spontan pada fasilitas berkualitas; Inovasi proaktif yang dipimpin komunitas.
II. Pelestarian Lingkungan	Partisipasi dalam kebersihan bersifat	Meluncurkan "Kompetisi Banjar	Kepedulian lingkungan spontan yang didorong

	kepatuhan, bukan proaktif.	Terbersih"; Mendirikan Bank Sampah berbasis incentif yang dikelola komunitas.	oleh kebanggaan dan manfaat ekonomi.
III. Kelestarian Budaya	Ketidaksesuaian aset- pasar; ketergantungan pada atraksi musiman.	Diversifikasi penawaran budaya menjadi lokakarya pengalaman sepanjang tahun; Mendirikan Forum Budaya.	Penciptaan spontan produk-produk budaya baru; Kontrol kualitas dan inovasi yang dipimpin oleh seniman.
IV. Manfaat Ekonomi Merata	Manfaat terkonsentrasi; ketergantungan pada pendanaan eksternal yang lambat.	Mengembangkan model investasi komunitas; Membentuk Dana Pembangunan Komunitas yang transparan melalui pungutan kecil.	Keinginan spontan untuk berkontribusi pada sistem kepemilikan dan manfaat bersama.

Untuk mengatasi masalah pertama yaitu status lahan, solusi yang dapat diusulkan adalah menggunakan mekanisme *paruman adat* (musyawarah adat). Pendekatan ini memanfaatkan filosofi *Tri Hita Karana*, di mana musyawarah sosial (*Pawongan*) dan penghormatan terhadap yang sakral (*Parahyangan*) digunakan untuk menyelesaikan konflik pemanfaatan lahan (*Palemahan*). Dengan memediasi perjanjian sewa jangka panjang, misalnya 5-10 tahun yang disertai komitmen dana *punia* (donasi) terstruktur kepada pura, kepastian hukum dapat tercapai, yang akan memicu investasi spontan dari masyarakat.

Permasalahan kedua yaitu pelestarian lingkungan, strategi yang dapat diusulkan bertujuan mengubah partisipasi yang bersifat kepatuhan menjadi inisiatif spontan. Meskipun kegiatan gotong royong sudah berjalan, partisipasi ini masih bersifat dorongan karena adanya instruksi dari desa. Untuk menumbuhkan motivasi internal, diusulkan program "Kompetisi Banjar Terbersih dan Hijau". Kompetisi ini diharapkan dapat membangkitkan rasa bangga komunal dan semangat kebersamaan, sehingga menjaga lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai bentuk kehormatan. Selain itu, untuk memperkuat kesadaran lingkungan melalui incentif ekonomi, akan didirikan Bank Sampah yang dikelola oleh komunitas. Warga yang menyertorkan sampah anorganik akan menerima imbalan ekonomi, mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai. Inisiatif ini juga dapat dikembangkan dengan pelatihan daur ulang untuk menciptakan produk kerajinan yang dapat dijual kepada wisatawan, menciptakan siklus

ekonomi sirkular di tingkat desa.

Untuk mengatasi masalah yang ketiga yaitu ketidaksesuaian pasar, strategi utamanya adalah diversifikasi produk budaya dari sekadar tontonan menjadi "pariwisata pengalaman" (*experiential tourism*). Alih-alih hanya mengandalkan tradisi Mekotek yang musiman, desa dapat menawarkan paket "Lokakarya Spirit Mekotek" sepanjang tahun, di mana wisatawan dapat belajar filosofi dan membuat perlengkapan ritualnya. Inisiatif ini, bersama dengan paket "Sehari Menjadi Seniman Munggu", akan menciptakan sumber pendapatan berkelanjutan bagi para seniman dan menjawab kebutuhan pasar yang mencari pengalaman otentik.

Pada permasalahan keempat perihal pemerataan manfaat ekonomi, strategi difokuskan untuk memastikan keuntungan pariwisata dirasakan secara luas dan adil. Pertama, akan dikembangkan model investasi komunitas di mana warga lokal dapat menjadi pemegang saham dalam aset wisata, seperti fasilitas di kawasan pantai setelah status lahan jelas. Keuntungan dari operasional fasilitas tersebut akan didistribusikan kembali kepada para investor komunitas, menciptakan keterikatan ekonomi yang kuat. Kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada dana eksternal yang lambat, akan dibentuk "Dana Pembangunan Komunitas" yang transparan. Dana ini bersumber dari kontribusi kecil (misalnya 1-2%) dari pendapatan setiap unit usaha pariwisata di desa. Pengelolaannya dilakukan oleh Pokdarwis atau BUMDes, dan penggunaannya diputuskan melalui musyawarah desa untuk program-program seperti beasiswa, pemeliharaan fasilitas umum, atau modal usaha baru bagi warga. Mekanisme ini memastikan manfaat pariwisata menyebar secara adil dan memperkuat solidaritas komunitas.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kondisi Partisipasi Terdorong yang terjadi di Desa Wisata Munggu bukanlah sebuah anomali, melainkan gejala dari kegagalan struktural yang lebih dalam dan saling terkait. Ketergantungan pada stimulus eksternal adalah respons logis dari sebuah komunitas yang dihadapkan pada ketidakpastian hukum, kelumpuhan birokrasi, dan pasar yang tidak menghargai aset unik mereka. Kerangka kerja empat permasalahan utama yang diusulkan dalam penelitian ini memiliki kekuatan karena pendekatannya yang holistik, terintegrasi, dan berakar pada kearifan lokal. Upaya perbaikan yang bersifat parsial, misalnya hanya memberikan pelatihan tanpa menyelesaikan masalah status lahan, terbukti akan gagal. Hanya melalui intervensi sistemik yang mengatasi semua hambatan secara bersamaan, siklus kepasifan dapat diputus dan partisipasi spontan dapat tumbuh. "Paradoks Munggu" berfungsi sebagai sebuah studi kasus penting bagi para pembuat kebijakan pariwisata, tidak hanya di Bali tetapi juga secara global. Kasus ini menyoroti bahaya dari penggunaan metrik kuantitatif yang dangkal (seperti jumlah kunjungan) sebagai satu-satunya indikator keberhasilan. Model diagnostik dan kerangka

strategis yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat menjadi alat yang direplikasi untuk destinasi lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan pariwisata berbasis komunitas. Pada akhirnya, esensi sejati dari *Community-Based Tourism* bukanlah sekadar tentang aktivitas ekonomi, melainkan tentang pemberdayaan dan penentuan nasib sendiri oleh komunitas. Transformasi dari partisipasi yang didorong menjadi partisipasi yang lahir secara spontan adalah penanda utama dari keberhasilan pemberdayaan tersebut, sebuah tujuan yang harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan:

1. Bagi Pemerintah Desa dan Pengelola Desa Wisata Munggu:
 - 1) Menyelesaikan Hambatan Struktural Terkait Lahan: Secara proaktif memfasilitasi musyawarah (*paruman*) antara calon pelaku usaha dengan pihak Pura Dalem untuk menegosiasikan skema sewa lahan jangka panjang (5-10 tahun) guna memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi.
 - 2) Diversifikasi Produk Wisata Budaya: Bekerja sama dengan sanggar seni lokal untuk mengemas paket wisata berbasis pengalaman (*experiential tourism*) yang tersedia sepanjang tahun, seperti "Workshop Spirit Mekotek" atau "Sehari Menjadi Seniman Munggu".
 - 3) Membentuk Mekanisme Pemerataan Pendapatan: Menginisiasi "Dana Pembangunan Komunitas" yang bersumber dari kontribusi kecil setiap unit usaha pariwisata, dikelola secara transparan, dan penggunaannya diputuskan melalui musyawarah desa untuk program yang bermanfaat bagi seluruh warga.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung (melalui Dinas Pariwisata):
 - 1) Menyederhanakan Alur Birokrasi Pendanaan: Menciptakan skema pendanaan khusus yang lebih fleksibel dan responsif untuk desa wisata agar rencana partisipatif dapat dieksekusi tepat waktu.
 - 2) Melakukan Reposisi Strategi Pemasaran: Membantu Desa Munggu menargetkan segmen wisatawan minat khusus (domestik dan mancanegara) yang mencari pengalaman budaya otentik, bukan hanya wisata pantai.
3. Bagi Masyarakat Lokal dan Pelaku Usaha:
 - 1) Meningkatkan Inisiatif dan Kolaborasi Kolektif: Secara aktif membentuk wadah kolaborasi seperti "Forum Budaya" atau koperasi pariwisata untuk merancang standar kualitas, jadwal pertunjukan, dan strategi harga bersama.
 - 2) Mengubah Orientasi Menuju Kualitas Pengalaman: Bergeser dari sekadar menyediakan produk menjadi menawarkan pengalaman berkualitas tinggi dengan meningkatkan layanan, kebersihan, dan narasi budaya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
 - 1) Melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dari

- ketidakpastian status lahan terhadap minat investasi masyarakat.
- 2) Menganalisis efektivitas strategi pemasaran baru yang menargetkan wisatawan minat khusus.
 - 3) Melakukan studi komparatif dengan desa wisata lain yang berhasil mentransformasikan partisipasi terdorong menjadi partisipasi spontan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, Y., & Eprilianto, D. F. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata melalui Pendekatan Community Based Tourism (Studi Pada Desa Tanjungan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 1269-1282.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Darmayantia, P. W., & Nugroho, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Espa Yeh Panes Natural Hot Spring Resort Di Desa Penatahan Tabanan. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 133-138.
- Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia.
- Murti, R. (2021). Inventarisasi Data Pertanahan Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan Di Wilayah Pesisir Munggu. *Seminar Nasional Geomatika 2020: Informasi Geospasial untuk Inovasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Purwaningsih, N. P. E., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Hambatan Desa Munggu Sebagai Desa Wisata Di Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 187.
- Putra, D. P. B. P. (2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan Desa Wisata Carangsari. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(2), 1-16.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiwinata, G. M., & Suryawan, I. B. (2017). Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa Di Desa Adat Kutuh Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 97-103.
- Suta, P. W. P., & Mahagangga, I. G. A. O. (2017). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Ekowisata Kampoeng Kepiting Tuban, Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(1), 144-149.
- Wijana, P. A., & Damayanti, L. S. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Tista. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 9(1), 59-64.